

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka ditarik kesimpulan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat sebagai berikut:

1. Kebijakan pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat desa merupakan rumusan yang dilakukan pemerintah daerah dalam merancang dan merencanakan pembangun daerahnya melalui visi, misi, dan program unggulan pemerintah daerah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Untuk membangun daerah tersebut diperlukan unsur-unsur yang dapat mendukung jalannya pembangunan daerah, baik dari peningkatan kualitas pendidikan, peningkatan kesejahteraan masyarakat atau ekonomi, peningkatan kesehatan, sosial, budaya, guna untuk menunjang peningkatan sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pada setiap daerah masalah kemiskinan merupakan kondisi yang tidak bisa dipungkiri, masalah ini tentunya menjadi perhatian pemerintah daerah untuk bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Desa dan pembangunan ekonomi bagi daerah. Untuk mengatasi hal ini pemerintah daerah dalam program pembangunan daerah salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan, yang kemudian kebijakan ini dijabarkan dalam program prioritas sebagai berikut: a) Program Pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya. b) Program Penunjang Lainnya. Indikator program yang akan dicapai adalah: a) Menurunnya jumlah penduduk atau keluarga

miskin. b) Terpenuhinya kebutuhan penunjang lainnya. untuk itu ada program yang dilakukan seperti Raskin, UMKM, KUBE, dan WUB.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pengentasan kemiskinan masyarakat desa, diantaranya adalah anggaran yang terbatas sehingga membuat pemerintah kesulitan dalam mengalokasikan keuangan, kemudian kurangnya komunikasi sehingga yang terjadi adalah diskomunikasi ditataran pemerintah terkait dalam pengentasan kemiskinan yang membuat pelaksanaan program berjalan tidak maksimal, selanjutnya sumber daya yang kurang mendukung serta masyarakat yang kurang pendidikan sehingga mereka tidak mempunyai keterampilan khusus untuk mengembangkan potensi dan bantuan yang modal yang berikan oleh untuk meningkatkan taraf hidup mereka kearah yang lebih baik, kemudian sikap pelaksana yang kurang bijaksana dalam melaksanakan tugas yang diemban, hal ini juga mempengaruhi tidak maksimalnya pengentasan kemiskinan masyarakat desa.

5.2 Saran

Dari kesimpulan diatas maka daran dari peneliti:

1. Untuk pemerintah daerah, dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pada pengentasan kemiskinan masyarakat, agar lebih memperhatikan apa saja yang menjadi faktor penghambat kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut, sebab faktor tersebut merupakan potensi yang dapat mendukung maskimalnya pelaksanaan suatu kebijakan apabila lebih dioptimalkan.
2. Untuk pemerintah desa, pada pelaksanaan kebijakan dalam hal pengentasan kemiskinan masyarakat desa, program-program yang telah dicanangkan

oleh pemerintah daerah dalam pelaksanaannya perlu ada pengawasan dan evaluasi yang dilakukan secara bertahap oleh aparat desa, sehingga program tersebut akan menyentuh pokok permasalahan kemiskinan yang ada di Desa tersebut.

3. Untuk masyarakat desa, kiranya dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk memanfaatkan sumber daya dan potensi yang dimiliki serta bantuan yang diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian serta produktivitas masyarakat.